

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Edisi Kedua*. Jakarta :Sinar Grafika,
- Astuti ,Laras. 2015.*Kebijakan Formulasi Tentang Cyber sex yang Dilakukan oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*.Yogyakarta:UII.
- Constanzo ,Mark. 2006. *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djoko, Prakoso.1986. *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*.Jakarta : Ghalia Indonesi
- Farid, Andi Zainal Abidin, 2007 *Hukum Pidana I* Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah,Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Handayani,T Astuti.2018. *HukumAcara Pidana Satu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*. Bandung : Nusamedia.
- Harahap ,M. Yahya. 2002.*Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta:Sinar Grafika,
- , 2010 *Pembahasan, Permasalahadan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta :Sinar Grafika
- , 1996.*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta :Ghalia Indonesia,
- ,2000.*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutomo, Dimas. *Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana*
- Lamintang. 1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet. III*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Lumingkewas, Firgie. 2016. *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*. Manado:UNSRAT
- Makaro, M Taufiq dan Suhasril.2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marpaung,Leden. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta :Sinar Grafika
- Martiman, R.Soesilo,1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor:Politeia
- Mulyadi, Lilik.2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Prodjodjokro ,Wirjono.1981. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, , Jakarta-Bandung : PenerbitEresco
- Prodjohamidjojo. 1983. *Sistem pembuktian dan Alat-Alat bukti*. Jakarta :Ghalia Indonesia
- Remmelink ,Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpentng dari Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia PustakaUtama
- Rifai Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Rukmini, Mein, 2003 *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Sabuan,Ansori dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa
- Salam , M Faisal.2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Bandung:Mandar Maju
- Sarwono,Jonatan,2006 *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualiatataif*, Yogyakarta:Graha Ilmu
- Simanjuntak ,Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soedirjo.1984.*Kasasi Dalam Perkara Pidana (sifat dan Fungsi)*. Jakarta. :Akademika Persindo

Soekanto, Soerjono, danMamudji,Sri,2007*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Jakarta :Grafindo Persada.

Sofyan ,Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Rangka Education.

Sumantri, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

Sutarto,Suryono, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid 1*,Semarang: Universitas Diponegoro.

Gie,The Liang.1982.*Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Utrecht. 1986.*Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas

B. Jurnal

Adiyaryani ,Ni Nengah,2010 “Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Indonesia”(Thesis Magister Ilmu HukumUniversitas Diponegoro

Fakhriah ,Efa Laela, Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerja sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Thema: “Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008”, tanggal 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung

Hiariej, Eddy O.S,2005 Criminal Justice System Indonesia ,Between Theory and Reality, Asia Low Review Vol.2 No2 Desember,KoreanLegislationResearch Institute.

Lamsu, Asmarani Upaya Hukum Pada Tingkat Kasai Terhadap Putusan Bebas (verkapte Vijspraak) Dalam Perkara Pidana, Jurnal Lex Crimen Vol.III No.4 Agustus-November

Pramana M Aditya,, 2013, *Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa (In Absentia)*, Jurnal LexCrimen Vol.II No.5, September

Rahmania, R Anna, Pencemaran Nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik”, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2015

C. Internet

Dimas Hutomo, S.H. *Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana* <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana/> diakses tgl 10/11/2020, 07:20

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. *Bentuk-Bentuk Putusan Bebas*. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52e84ef784aac/bentuk-bentuk-putusan-bebas/>. (diakses pada Februari 2020, pukul 12.00)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f31128fb2f20/kasasi-putusan-bebas-langgar-hak-atas-kepastian-hukum> diakses pada tanggal 21 januari 2020 pukul 07.39 WIB

<https://hukamnas.com/asas-asas-hukum-acara-pidana/amp> diakses pada tanggal 18 apr 2020 pukul 13.00

D. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983
tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

